



Kepemilikan Aset, Akses Modal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat kemiskinan Di Sumatera

Vani Yulia Putri *¹, Yulhendri²

^{1,2}Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Email: vaniyuliaputri165@gmail.com¹, yulhendri@fe.unp.ac.id²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.3035>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :

2026-02-09

Diperbaiki :

2026-02-10

Disetujui :

2026-02-11

Kata Kunci :

Kemiskinan; Kepemilikan Aset;

Akses Modal; Kualitas SDM

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan yang dialami individu, berdampak langsung pada kesejahteraannya dan menjadi persoalan mendasar yang sulit diatasi diseluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan aset, akses modal dan kualitas SDM terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan asosiatif dengan analisis model regresi data panel dan alat bantu *views 12*. Data panel terdiri atas data *cross section* 10 provinsi di Sumatera dan data *time series* tahun 2019-2023 berupa data sekunder yang bersumber dari instansi BPS Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Model analisis regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan aset dan Kualitas SDM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera, sedangkan variabel akses modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Sementara itu variabel kepemilikan aset, akses modal dan SDM secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera.

ABSTRACT

Poverty is a condition of deprivation experienced by individuals, which directly impacts their well-being and is a fundamental problem that is difficult to overcome in all countries in the world, including Indonesia. This study analyzes the impact of asset ownership, capital access, and human resource quality on poverty rates in Sumatra. Using an associative approach with panel data regression and EViews 12, this study examines secondary data from 10 Sumatran provinces (2019-2023) sourced from the Central Bureau of Statistics and Bank Indonesia. Data collection uses documentation, and the Fixed Effects Model is applied for analysis. The results show that asset ownership and human resource quality significantly influence poverty rates individually, while capital access does not have a significant partial effect. However, collectively, asset ownership, capital access, and human resources significantly influence poverty rates in Sumatra.

Keywords:

Povert; Asset Ownership Access to Capital; Human Resource Quality

Alamat Korespondensi

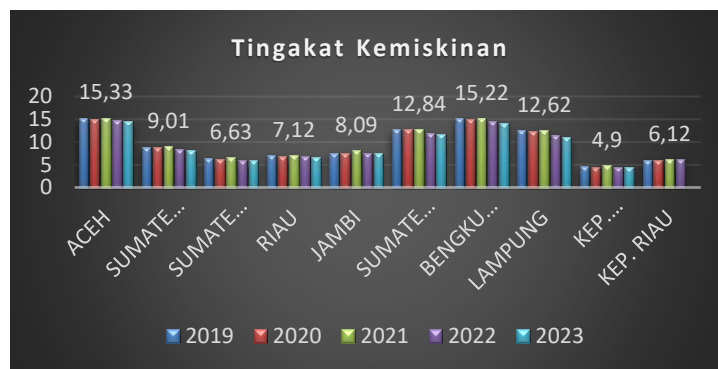
: Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi kekurangan yang berdampak pada kesejahteraan individu dan menjadi masalah mendasar yang masih sulit diatasi, termasuk di Indonesia (Adhitya et al., 2022). Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa kemiskinan secara ekonomi berakar pada tiga

persoalan mendasar. Ketimpangan kepemilikan sumber daya menjadi penyebab awal karena menciptakan jurang distribusi pendapatan, di mana masyarakat miskin hanya memiliki aset yang minim dan kurang bernilai. Selain itu, rendahnya mutu sumber daya manusia menghambat produktivitas sehingga berdampak langsung pada rendahnya penghasilan. Faktor pendidikan, diskriminasi, dan kondisi sosial turut memperparah situasi tersebut. Faktor terakhir adalah keterbatasan akses terhadap modal yang semakin mengunci masyarakat dalam lingkaran kemiskinan.

Laporan Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi keempat negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia pada 2024, di mana lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah standar kesejahteraan minimum. Realitas ini memperlihatkan betapa beratnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan. Beragam program telah digulirkan, namun hasilnya belum sepenuhnya menjangkau wilayah yang paling terdampak. Situasi ini menegaskan bahwa kebijakan parsial tidak cukup, dan diperlukan strategi lintas sektor yang menysasar persoalan mendasar seperti ketimpangan pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ekonomi (Maulana, 2023). Secara nasional, angka kemiskinan menunjukkan penurunan tipis menjadi 8,47% pada Maret 2025. Namun, di balik tren positif tersebut tersimpan persoalan baru, seperti meningkatnya kemiskinan perkotaan, melemahnya daya beli masyarakat, serta ancaman kembalinya kelompok miskin ekstrem ke jurang kemiskinan. Pulau Sumatra mencerminkan wajah kemiskinan yang beragam. Aceh, Bengkulu, dan Sumatra Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Sumatra Barat menunjukkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Faktor pendidikan, daya beli, dan komposisi kebutuhan dasar menjadi elemen kunci yang menentukan kondisi tersebut. Dengan lebih dari 5,5 juta penduduk miskin di Sumatra, penguatan kebijakan sosial tetap menjadi kebutuhan mendesak agar kemiskinan tidak terus berulang (Faujan & Agustina, 2023)



Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan grafik yang menggambarkan tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023, terlihat bahwa sejumlah provinsi masih mencatatkan persentase kemiskinan yang melampaui rata-rata nasional Indonesia sebesar 8,47%. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Provinsi Aceh menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,32% pada tahun 2019,

meskipun mengalami penurunan menjadi 14,45% pada tahun 2023, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan serius. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan tingkat kemiskinan terendah, yakni 4,62% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 4,52% pada tahun 2023, yang mengindikasikan keberhasilan relatif dalam pengendalian kemiskinan.

Dinamika kemiskinan juga tampak di sejumlah provinsi lain. Sumatera Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,83% pada 2019 menjadi 8,15% di tahun 2023, menandakan arah perbaikan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan itu, Sumatera Barat dan Riau bergerak di jalur yang relatif konstan, dengan perubahan persentase yang tidak terlalu signifikan.

Menurut Kuncoro (2003), dari sudut pandang ekonomi terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Pertama, ketimpangan kepemilikan sumber daya menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga kelompok miskin hanya menguasai sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah serta tidak mampu bersaing secara ekonomi. Kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat produktivitas, di mana rendahnya produktivitas berimplikasi pada rendahnya pendapatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, faktor sosial, serta adanya diskriminasi yang membatasi akses terhadap pendidikan yang layak. Ketiga, keterbatasan akses terhadap modal menyebabkan masyarakat miskin mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan usaha dan investasi (Maharani et al., 2024).

Teori *vicious circle of poverty* yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Jhingan (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi struktural yang cenderung mempertahankan dirinya sendiri. Negara yang berada dalam kemiskinan akan menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai pembangunan yang lebih maju. Buruknya kondisi kesehatan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi terbatas. Produktivitas yang rendah berimplikasi pada pendapatan yang minim, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, menabung, dan berinvestasi. Kondisi tersebut menghambat akumulasi modal dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan kemiskinan antar generasi. Salah satu faktor utama yang mempersulit pengentasan kemiskinan adalah keterbatasan kepemilikan aset. Individu atau kelompok yang memiliki aset, seperti lahan atau modal usaha, memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif. Sebaliknya, ketiadaan aset membuat masyarakat rentan terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan (Aini, 2024).

Permodalan berperan sebagai pintu utama bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, pintu tersebut kerap tertutup akibat keterbatasan jaminan dan rendahnya literasi keuangan dalam mengakses lembaga formal (Sinurat, 2023). Akibatnya, potensi peningkatan pendapatan terhambat dan kemiskinan terus berulang.

Mutu sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta menjadi faktor kunci dalam menentukan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (Wahid et al., 2024). Ketimpangan akses pendidikan antara kelompok sosial

ekonomi atas dan bawah memperlebar kesenjangan kesempatan dan capaian. Walaupun pengeluaran pendidikan antara kelompok kaya dan miskin relatif sebanding, kualitas serta peluang pendidikan yang diperoleh menunjukkan perbedaan mencolok. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi umumnya memperoleh akses terhadap institusi pendidikan yang lebih unggul, sarana yang memadai, serta tenaga pendidik berkualitas (Susanto et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada ketimpangan kompetensi dan pengetahuan yang selanjutnya memengaruhi daya saing di pasar kerja.

Kemiskinan dari sudut pandang ekonomi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh tiga mata rantai utama. Pada level mikro, ketidakmerataan kepemilikan sumber daya menciptakan jurang pendapatan yang lebar, sehingga kelompok miskin terjebak dengan aset yang terbatas dan bermutu rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda memengaruhi produktivitas kerja. Ketika produktivitas rendah, nilai tenaga kerja pun menurun, yang berujung pada upah kecil. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh minimnya pendidikan, diskriminasi sosial, keberuntungan hidup, maupun latar belakang keluarga. Faktor berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Ketiga faktor ini membentuk siklus kemiskinan, di mana keterbatasan modal dan pasar yang tidak sempurna menekan produktivitas, menurunkan pendapatan, serta menghambat tabungan dan investasi, sehingga kemiskinan terus berulang (Muna, 2025).

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan situasi keterbatasan yang membelenggu individu sehingga menghambat tercapainya kehidupan yang sejahtera. Fenomena ini menjadi persoalan krusial yang terus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (Adhitya et al., 2022).

Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa secara ekonomi, kemiskinan berakar pada tiga aspek utama. Pertama, ketimpangan kepemilikan sumber daya yang menciptakan jurang pendapatan antar kelompok masyarakat. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menurunkan produktivitas kerja dan berimplikasi pada upah yang kecil, akibat pendidikan yang terbatas, diskriminasi, serta faktor sosial lainnya. Ketiga, minimnya akses terhadap permodalan yang menghambat masyarakat miskin dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.

Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan cenderung memelihara dirinya sendiri. Konsep *vicious circle of poverty* menurut Ragnar Nurkse menunjukkan bahwa rendahnya tabungan memicu lemahnya investasi dan kelangkaan modal, yang berujung pada produktivitas serta pendapatan yang rendah, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut (Prawoto, 2009).

Menurut Ragnar Nurkse (dalam Sukirno, 2006), kemiskinan dipahami sebagai suatu lingkaran yang bersifat saling mengikat dan dapat ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan. Dalam teori lingkaran perangkap kemiskinan, rendahnya tingkat produktivitas merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Dari sisi penawaran modal, rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga kemampuan menabung menjadi terbatas. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pembentukan modal yang pada akhirnya menimbulkan kekurangan barang modal dan mempertahankan rendahnya produktivitas.

Sementara itu, dari sisi permintaan modal, negara miskin menghadapi lemahnya dorongan investasi akibat terbatasnya pasar yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah tersebut merupakan dampak dari produktivitas yang rendah akibat pembentukan modal yang minim di masa lalu. Nurkse juga menegaskan bahwa pembentukan modal tidak hanya terhambat oleh lingkaran kemiskinan, tetapi juga oleh adanya *international demonstration effect*

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang melampaui batas status negara, karena tidak hanya ditemukan di negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang kaya akan sumber daya. Isu ini telah menjadi persoalan universal yang turut membebani Indonesia (Rafil, 2019). Di negara berkembang, kemiskinan menjadi agenda strategis pemerintah karena berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan populasi yang sangat besar, Indonesia masih berjuang menghadapi kompleksitas masalah kemiskinan (World Bank, 2023).

Kepemilikan Aset

Rendahnya kepemilikan aset merupakan faktor struktural yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan (M. Kuncoro, 2003). Aset yang dimiliki rumah tangga berperan penting dalam menentukan akses mereka terhadap pasar. Nanga menyatakan bahwa kepemilikan aset mencerminkan tingkat kekayaan rumah tangga yang berdampak pada pola dan tingkat konsumsi. Sementara itu, Sahdan memaknai kepemilikan aset sebagai penguasaan sarana produktif oleh rumah tangga yang berimplikasi langsung terhadap pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut (Jacobus et al., 2019). Menurut Syamsul Amar, kemiskinan relatif tercermin dari ketimpangan penguasaan aset produksi, khususnya lahan pertanian, serta ketidakmerataan distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Pemerataan penguasaan lahan berperan strategis dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil karena lahan merupakan faktor produksi utama bagi rumah tangga.

BAPPENAS menempatkan persoalan kepemilikan tanah sebagai cerminan nyata kemiskinan. Ketidakadilan distribusi lahan serta absennya kepastian hukum atas tanah pertanian menjadi realitas yang dihadapi kelompok miskin. Bagi rumah tangga di kawasan perdesaan dan persawahan, tanah bukan sekadar sumber daya, melainkan penopang utama kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun semakin terlihat melalui akumulasi aset yang dimiliki, seperti lahan, kendaraan, dan barang elektronik. (Khomhsan et al., 2015)

Keterbatasan aset yang dimiliki rumah tangga menyebabkan akses terhadap sarana produksi menjadi sempit, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan (Kuncoro, 2010). Menurut Sahdan, aset merupakan alat produktif yang dikuasai keluarga dan berperan penting dalam menentukan tingkat pendapatan. Dalam konteks keluarga miskin, aset biasanya hanya berupa lahan pertanian dan tempat tinggal yang ditempati, (Sa'diyah, 2012).

Akses Modal

Dalam dunia kewirausahaan, keberadaan akses modal menjadi fondasi penting yang menopang jalannya usaha. Akses berfungsi sebagai pintu masuk terhadap sumber daya,

sementara modal, menurut KBBI, adalah dana yang dimanfaatkan dalam transaksi serta proses penciptaan nilai dan peningkatan kekayaan

Dalam kajian kemiskinan, akses keuangan dipahami sebagai pintu masuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori ini berpijak pada prinsip inklusi keuangan yang menekankan perlunya membuka peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi rentan untuk terhubung dengan layanan keuangan formal (Ummah et al., 2018). Ketiadaan akses terhadap fasilitas seperti tabungan, pembiayaan mikro, dan asuransi sering kali membatasi kemampuan individu dalam keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketika akses keuangan diperluas, masyarakat miskin dapat mengelola risiko secara lebih adaptif, memperkuat usaha produktif, serta menanamkan investasi jangka panjang pada pendidikan dan kesehatan (Yushita, 2017). Dengan demikian, inklusi keuangan bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan instrumen penting dalam mendorong transformasi sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.

Jaka Sriyana (dalam Yusuf, 2021) menekankan bahwa penguatan ekonomi masyarakat memerlukan langkah strategis yang selektif, salah satunya melalui kemudahan memperoleh akses permodalan. Menurut Kasmir (2007), modal usaha dapat berasal dari dana pribadi maupun dari sumber eksternal berupa pinjaman. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior, tindakan seseorang dibentuk oleh aspek individu, lingkungan sosial, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi mengenai akses modal berperan krusial dalam upaya memulai dan mengembangkan usaha.

Kualitas SDM

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utamanya. SDM yang unggul menjadi penggerak kesejahteraan dan penopang daya saing suatu bangsa. Di Indonesia, kualitas SDM mencerminkan integrasi antara pendidikan, kesehatan, kecakapan kerja, dan nilai karakter individu. Perspektif ekonomi pembangunan menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai investasi strategis jangka panjang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Sen, 2022) dalam (Ayu Eka Putri, 2024)

Pendidikan inklusif yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian internasional mengungkapkan bahwa tingginya indeks pendidikan suatu negara berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan berinovasi (UNESCO, 2023) dalam (Ayu Eka Putri, 2024). Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan, pembaruan kurikulum, serta peningkatan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok negeri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Inisiatif ini mendukung pencapaian SDG ke-4 tentang pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Kemiskinan dan pendidikan membentuk hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Melalui perspektif teori human capital, pendidikan dipahami sebagai investasi jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas individu dan membuka jalan menuju mobilitas ekonomi yang lebih baik (Nurkholis, 2016). Namun, bagi kelompok miskin, keterbatasan biaya dan sarana sering menjadi penghalang utama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Di sisi lain,

rendahnya tingkat pendidikan turut memperpanjang rantai kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Dengan demikian, intervensi pendidikan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam memutus siklus kemiskinan dan menciptakan kesetaraan sosial (Fadil et al., 2023).

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menelaah keterkaitan antarvariabel melalui analisis regresi data panel. Data penelitian mencakup gabungan data lintas wilayah dan waktu dari 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Informasi yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari publikasi resmi BPS Indonesia serta Bank Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara selektif melalui teknik purposive sampling dalam kerangka non-probability sampling. Seluruh data dikumpulkan melalui dokumentasi dan diolah menggunakan analisis regresi data panel dengan aplikasi EViews versi 12.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Basis data penelitian ini berupa data panel yang mencakup 50 pengamatan hasil penggabungan sepuluh provinsi di Sumatera selama periode 2019–2023. Setiap provinsi pada masing-masing tahun menjadi unit analisis, dengan variabel independen berupa kepemilikan aset, akses modal, dan kualitas SDM, serta kemiskinan sebagai variabel dependen.

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Statistik	X1	X2	X3	Y
Mean	20.67140	5.95880	1.679600	9.424400
Median	18.36000	5.705000	1.675000	8.120000
Maximum	33.63000	7.510000	3.020000	15.33000
Minimum	7.600000	4.270000	0.710000	4.450000
Std. Dev.	7.887135	0.957134	0.525365	3.667408
Skewness	0.240174	0.128253	0.332893	0.356390
Kurtosis	1.657563	1.794395	2.643048	1.631637
Jarque-Bera	4.235147	3.165164	1.188927	4.959319
Probability	0.120323	0.205444	0.551859	0.083772
Sum	1033.570	297.9400	83.98000	471.2200
Sum Sq. Dev.	3048.138	44.88913	13.52439	659.0440
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Hasil analisis deskriptif terhadap 50 data observasi periode 2019–2021 menunjukkan dinamika yang beragam antarprovinsi. Kepemilikan aset (X1) tercatat memiliki rata-rata 20.671,40, dengan rentang nilai antara 7,60 hingga 33.630,00. Besarnya standar deviasi (7.887,1) mencerminkan ketimpangan kepemilikan aset yang cukup nyata, meskipun pola distribusinya relatif seimbang sebagaimana ditunjukkan oleh nilai skewness 0,24. Pada variabel akses modal (X2), nilai rata-rata mencapai 5,95 dengan sebaran data yang cukup luas. Perbedaan ini menandakan adanya disparitas akses modal antarprovinsi di Sumatera, yang diperkuat oleh

standar deviasi sebesar 0,95. Distribusi data cenderung miring ke kanan (skewness 1,12) namun tetap mendekati normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai kurtosis 1,79 dan hasil uji Jarque-Bera yang signifikan secara statistik. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, kualitas SDM (X3) menunjukkan variasi yang lebih terkendali. Dengan rata-rata 1,67 dan standar deviasi 0,52, perbedaan kualitas SDM antarprovinsi relatif tidak terlalu mencolok. Sebaran data SDM memperlihatkan keseimbangan yang cukup baik, ditunjukkan oleh nilai skewness sebesar 0,33 dan kurtosis 2,64 yang mendekati karakteristik distribusi normal. Normalitas data ini dikonfirmasi melalui uji Jarque-Bera dengan nilai probabilitas 0,0837, yang berada di atas ambang signifikansi. Sementara itu, tingkat kemiskinan (Y) memiliki nilai rata-rata 9,42 persen, dengan variasi yang lebar antara 4,45 persen hingga 15,33 persen. Kondisi tersebut menggambarkan heterogenitas tingkat kemiskinan yang nyata antarprovinsi dan periode di Pulau Sumatera. Tingginya variasi antarwilayah tercermin dari standar deviasi sebesar 3,67. Distribusi data kemiskinan cenderung sedikit miring ke kanan (skewness 0,36) dan bersifat platikurtik dengan nilai kurtosis 1,63. Hasil uji Jarque-Bera dengan probabilitas 0,0837 kembali menunjukkan bahwa data kemiskinan mengikuti distribusi normal.

Analisis Induktif

Penelitian ini difokuskan pada penelusuran fakta aktual tentang bagaimana kondisi pendidikan, kesehatan, dan pengangguran di Indonesia membentuk dinamika kemiskinan. Proses analisis dilakukan secara induktif menggunakan perangkat analisis EViews 12.

Analisis Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Analisis ini digunakan untuk menyeleksi model regresi yang paling tepat antara Common Effect dan Fixed Effect. Keputusan ditentukan melalui nilai probabilitas, dengan batas signifikansi 0,05 sebagai tolok ukur. Karena hasil pengujian menunjukkan p-value 0,0000 yang berada di bawah ambang tersebut, maka Fixed Effect Model diterapkan. Setelah model ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	604.899237	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	249.907096	9	0.0000

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Nilai probabilitas Cross-section F yang diperoleh dari pengujian sebesar 0,0000 ($< 0,05$) menegaskan bahwa H_0 tidak dapat diterima. Dengan demikian, pendekatan Fixed Effect Model (FEM) lebih unggul dibandingkan Common Effect Model dalam analisis ini.

Uji Hausman

Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,0068 ($< 0,05$), sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM)

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f	Prob
Cross-section random	12.179440	3	0.0068

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mendeteksi hubungan kuat antar variabel independen dalam model regresi melalui analisis korelasi.

Tabel 3 . Hasil Analisis Deskriptif

Variable	X1	X2	X3
X1	1	0.21400360	-0.5045234
X2	0.21400360	1	-0.1075646
X3	-0.5045234	-0.1075646	1

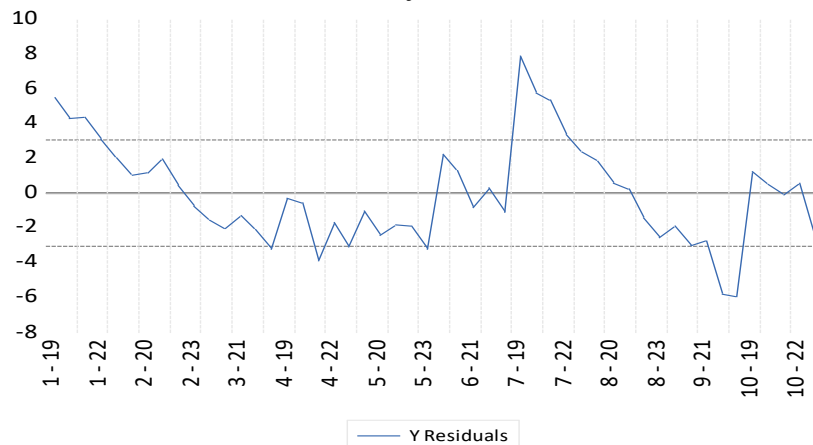
Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Nilai korelasi tertinggi antar variabel independen sebesar 0,214 berada di bawah batas toleransi 0,80, sehingga model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedastisitas diuji guna memastikan apakah penyebaran residual dalam model regresi menunjukkan keseragaman atau justru berfluktuasi

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedasitas



Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Grafik residual (garis biru) di atas menunjukkan nilai yang berada dalam rentang -500 hingga 500, menandakan varians residual konstan. Dengan demikian, model dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.77836	3.595831	4.666061	0.0000
X1	-0.321056	0.064770	-4.956849	0.0000
X2	0.713422	0.463511	1.539171	0.1306
X3	-2.958104	0.955390	-3.096227	0.0033

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model*, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 16,778 - 0,321056 \text{ Kepem_Asset} - 0,713422 \text{ Akses_Modal} - 2,985 \text{ Sdm}$$

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (t)

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.77836	3.595831	4.666061	0.0000
X1	-0.321056	0.064770	-4.956849	0.0000
X2	0.713422	0.463511	1.539171	0.1306
X3	-2.958104	0.955390	-3.096227	0.0033

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Hasil uji t menunjukkan bahwa:

1. **Kepemilikan Aset** memiliki nilai probabilitas sebesar **0,000** ($> 0,05$), sehingga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2. **Akses Modal** memiliki nilai probabilitas sebesar **0,1306** ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
3. **Sumber Daya Manusia (SDM)** memiliki nilai probabilitas sebesar **0,0033** ($< 0,05$) dan koefisien negatif, yang berarti **SDM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan**. Peningkatan kualitas SDM dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Uji Simultan (F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F-statistic sebesar 8,53 dengan probabilitas 0,00 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F

Statistik	Nilai
R-squared	0.357691
Adjusted R-squared	0.315801
S.E. of regression	3.033545
Sum squared resid	423.3102
Log likelihood	-124.3490
F-statistic	8.538857
Prob(F-statistic)	0.000129

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas 0,000129 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Aset, Akses Modal, dan SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Koefisien Determinan (R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (t)

Statistik	Nilai
R-squared	0.357691
Adjusted R-squared	0.315801
S.E. of regression	3.033545
Sum squared resid	423.3102
Log likelihood	-124.3490
F-statistic	8.538857
Prob(F-statistic)	0.000129

Sumber: Data sekunder data diolah Eviews 12

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,3158, yang berarti bahwa variabel independen dalam

penelitian ini mampu menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 31,58%, sedangkan sisanya 68,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kepemilikan Aset terhadap kemiskinan di Sumatera Tahun 2019–2023

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel kepemilikan aset memiliki koefisien sebesar -0,321056 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan aset yang ada sepenuhnya bersifat produktif atau mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tri Susanti (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan aset berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tahun 2020, terutama pada kondisi krisis. Selain itu, Ramadhani et al. (2022) juga menyatakan bahwa keterbatasan pemanfaatan aset rumah tangga menyebabkan kemiskinan tetap tinggi. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Andriani (2019) serta Alvianita Suleman et al., yang menemukan bahwa kepemilikan aset berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan masyarakat transmigran. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak kepemilikan aset sangat bergantung pada konteks wilayah dan kemampuan masyarakat dalam mengelola aset tersebut

Pengaruh Akses Modal terhadap kemiskinan di Sumatera Tahun 2019–2023

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel akses modal memiliki koefisien sebesar -0,713422 dengan nilai probabilitas 0,1306 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa akses modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Meskipun koefisien bernilai negatif, akses modal yang tersedia belum mampu menurunkan kemiskinan secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses modal dan lemahnya pengelolaan kredit mikro memperburuk kemiskinan. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan Andriani (2019) dan Saputro et al. (2022) yang menemukan bahwa akses modal berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, terutama di wilayah dengan kualitas SDM yang lebih baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas akses modal sangat bergantung pada kesiapan SDM dan pendampingan ekonomi yang memadai.

Pengaruh Kualitas SDM terhadap kemiskinan di Sumatera Tahun 2019–2023

Berdasarkan hasil regresi, variabel kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki koefisien sebesar -2,958104 dengan nilai probabilitas 0,0033 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Artinya, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Yasirwan et al. (2023) yang menemukan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Pulau Sumatera. Selain itu, Satriawan, Ratih, dan Setiawan (2023) serta Istiazah dan Satrianto (2023) juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas SDM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa SDM merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Sumatera.

Pengaruh Kepemilikan Aset, Akses Modal, dan Kualitas SDM terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Tahun 2019–2023

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 8,53 dengan probabilitas 0,000129 ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa kepemilikan aset, akses modal, dan kualitas SDM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Nilai Adjusted R² sebesar 0,3158 menunjukkan bahwa 31,58% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Andriani (2019) dan Roostartina (2021) yang menyatakan bahwa aset, modal, dan SDM saling berkaitan dalam memengaruhi kemiskinan. Selain itu, Hanisah (2024) dan Harahap (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dan dukungan modal secara simultan mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera memerlukan pendekatan multidimensional yang terintegrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepemilikan aset, akses modal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera pada tahun 2019-2023, diperoleh beberapa kesimpulan. Kepemilikan aset tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Akses modal juga tidak berpengaruh signifikan meskipun menunjukkan kecenderungan negatif, hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti kurangnya jaminan dan kemampuan manajerial yang rendah. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan efektif dalam menurunkan kemiskinan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan kontribusi sekitar 34,61% terhadap variasi tingkat kemiskinan, menegaskan perlunya pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan kepemilikan aset, akses modal, dan peningkatan kualitas SDM.

Selanjutnya sesuai pembahasan di atas dikemukakan saran yaitu, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas SDM dengan memperluas akses dan mutu pendidikan serta pelatihan keterampilan, disertai dukungan program kesehatan dan kesejahteraan. Optimalisasi pemanfaatan aset harus didukung dengan pendampingan pengelolaan aset produktif dan

kebijakan yang menjamin kepemilikan aset secara hukum untuk meningkatkan rasa aman dan investasi masyarakat. Peningkatan akses dan pengelolaan modal juga penting, dengan sosialisasi mekanisme lembaga keuangan formal, penguatan program kredit mikro, dan pengembangan lembaga keuangan inklusif di daerah terpencil. Pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk efektivitas penanggulangan kemiskinan, disertai monitoring dan evaluasi berkala. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel dengan memasukkan faktor infrastruktur, kebijakan, dan kondisi sosial budaya serta menggunakan metode kualitatif atau campuran untuk gambaran yang lebih mendalam, termasuk memperluas cakupan wilayah dan periode waktu penelitian guna memahami dinamika kemiskinan secara lebih komprehensif. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini dengan variabel dan metode yang lebih luas.

REFERENSI

- Adhitya, B. ... Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Aini, A. N. (2024). The Transformation of Productive Waqf in Business Forms and Risk Management to Alleviate Poverty. *The 5th ICO EDUSHA 2024*, 115–131.
- Ayu Eka Putri. (2024). Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan. *Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, November*.
https://www.researchgate.net/publication/386023550_Kualitas_Sumber_Daya_Manusia_Indonesia_sebagai_Faktor_Penentu_Keberhasilan_Pembangunan_Berkelanjutan
- Fadil, K. ... Amran, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-negara ASEAN dalam Mendukung Sustainable Developments Goal. *Islamika*, 5(1), 279–295. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2778>
- Faujan, L. O., & Agustina, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021 (Analysis of Factors Affecting Household Extreme Poverty Status in Maluku Province in 2021). *Seminar Nasional Official Statistics*, 2, 343–352.
- Jacobus, E. H. ... Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–16. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Jhingan, M. . (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.RajaGrafindo Persada.
- Khomsan, A. ... Syarief, H. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, . Erlangga.
- Kuncoro, P. M. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. ERLANGGA.
- Maharani, C. ... Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Maulana, I. R. (2023). Kesenjangan Sosial dalam Distribusi Kekayaan: Tantangan Bagi

- Pembangunan Berkelanjutan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
- Muna, M. N. (2025). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3817–3824.
- Prawoto. (2009). Memahami Kemiskinan dan Mengatasi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>
- Rafil, S. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2017. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia*. https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Aduly_adej's_Funeral.pdf
- Sa'diyah, Y. H. (Yufi). (2012). *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga melalui Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Diponegoro University.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi pembangunan (Edisi Kedua, Jilid 8)*. Kencana.
- Susanto, T. T. D. ... Tsabita Malfanda. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Ummah, B. B. ... Anggraeni, L. (2018). Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1–27. <https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.2015.1-27>
- Wahid, W. ... Farhan, A. (2024). Kualitas sumber daya manusia sebagai aspek fundamental dalam menunjang perekonomian. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 330–341. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.1169>
- Yushita, A. N. (2017). JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI Amanita Novi Yushita. *Nominal*, VI(1), 11–26.
- Yusuf, D. F. (2021). Pengaruh Jiwa Wirausaha, Akses Modal, Ekspektasi Pendapatn dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha (Studi Kasus Pada Kampung Kiringan Baru Dan Kampung Candi Nambangan, Kota Magelang). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang*, 28–30.